

Komunikasi Kepemimpinan Politik Berkarakter, Menjadi Aspek Krusial Terhadap Kepercayaan Masyarakat

Hadrizal^{*1}, Budi Satria²

^{1,2}Universitas Abdurrah

e-mail: ^{*1}hadrizal@univrab.ac.id, ²budisatria@univrab.ac.id

Diterima: 14 Agustus 2025.

Direview: 21 Agustus 2025

Diterbitkan: 22 Agustus 2025

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Open Access

Abstract – This study aims to analyze the forms of political communication used by political leaders with characteristics, understand why political communication is a crucial aspect of such leadership, and assess its impact on public trust in government institutions and public policy. The method used was library research with a descriptive qualitative approach, which included analysis of academic literature, scientific journals, official documents, and digital publications. The results indicate that political leaders with characteristics tend to use political communication based on moral values, honesty, transparency, and accountability. This communication is considered crucial due to high public expectations for leadership integrity and the challenges of the complexity of modern political issues. The findings also indicate that political leadership with characteristics has a positive impact on increasing public trust, political participation, and socio-political stability. This study has limitations because it does not involve field data and is descriptive and qualitative in nature. Nevertheless, this research provides important insights for the development of ethical political communication strategies, public political education, and further empirically based studies.

Keywords: *Political leadership, political communication, moral values, public trust, transparency.*

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk komunikasi politik yang digunakan pemimpin politik berkarakteristik, memahami mengapa komunikasi politik menjadi aspek krusial dalam kepemimpinan tersebut, serta menilai dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan publik. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang melibatkan analisis literatur akademik, jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan publikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin politik berkarakteristik cenderung menggunakan komunikasi politik berbasis nilai moral, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Komunikasi tersebut dipandang krusial karena ekspektasi publik yang tinggi terhadap integritas kepemimpinan dan tantangan kompleksitas isu politik modern. Temuan juga mengindikasikan bahwa kepemimpinan politik berkarakteristik berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan publik, partisipasi politik, dan stabilitas sosial-politik. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan data lapangan dan bersifat kualitatif deskriptif. Meski demikian, penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi

komunikasi politik yang etis, pendidikan politik masyarakat, dan studi lanjutan yang berbasis data empiris.

Kata Kunci: Kepemimpinan politik, komunikasi politik, nilai moral, kepercayaan publik, transparansi.

Kata Kunci – Kepemimpinan politik, komunikasi politik, nilai moral, kepercayaan publik, transparansi.

I. PENDAHULUAN

Kepemimpinan politik merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pemerintahan yang demokratis maupun otoriter. Peran seorang pemimpin politik tidak hanya sekadar menjalankan kekuasaan, tetapi juga mengarahkan, menginspirasi, dan memengaruhi arah kebijakan serta masa depan suatu bangsa. Dalam konteks ini, karakteristik kepemimpinan politik menjadi aspek yang sangat krusial untuk dikaji, karena dari sinilah masyarakat dapat menilai kualitas dan efektivitas seorang pemimpin dalam memikul tanggung jawab politiknya.

Kepemimpinan politik di era global adalah menyatukan sumber daya bersama secara cerdas untuk mencapai tujuan politik domestik dan internasional (Joseph S. Nye Jr., 2021). Menurut World Economic Forum, (2022) bahwa kepemimpinan politik modern adalah Kemampuan memfasilitasi kerja sama lintas batas negara, merespons tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi, serta menjaga keseimbangan sosial-politik dalam konteks ketidakpastian global. Hubungan elit politik atau pemimpin dengan masyarakat saling mendukung, sampai kepada motivasi dan moralitas yang lebih tinggi dengan tujuan pada perubahan dan visi masa depan Burns, J. M. (2019). Karakteristik kepemimpinan politik umumnya mencerminkan kemampuan seorang pemimpin untuk mengelola kekuasaan, memengaruhi publik, dan mengarahkan kebijakan. Karakteristik kepemimpinan politik seperti ini memiliki visi yang jelas dan strategis serta memiliki pandangan ke depan yang terarah serta mampu menetapkan tujuan yang jelas untuk negara atau organisasi politik (Kotter, 2012).

Kepemimpinan politik yang berkarakter adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada nilai-nilai integritas, moralitas, keadilan, empati, dan komitmen terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok Bass, B. M., & Bass, R. (2008). Pemimpin politik dengan karakter kuat biasanya konsisten dalam prinsip, jujur, memiliki visi yang jelas, serta berpegang pada etika politik Yukl, G. (2013). Akan tetapi, kepemimpinan seperti ini sering membuat komunikasi politik menjadi krusial, karena terdapat beberapa hal seperti ekspektasi masyarakat yang tinggi artinya seorang pemimpin berkarakter dituntut menyampaikan kebijakan dengan transparan dan jelas, sehingga kesalahan komunikasi bisa merusak kepercayaan publik Ardern, J. (2020). Konflik nilai tertentu dengan kepentingan politik seperti anti korupsi atau keberlanjutan lingkungan sering bertabrakan dengan kepentingan pragmatis, sehingga komunikasi politik harus mampu mengelola resistensi.

Selanjutnya sensitivitas isu publik di era digital, dimana masyarakat semakin kritis di media sosial dapat memperbesar dampak komunikasi yang kurang tepat dan tuntutan akuntabilitas tinggi karena pemimpin berkarakter cenderung mendorong keterbukaan, yang menuntut komunikasi intensif dan konsisten agar publik memahami proses dan keputusan politik yang diambil Arifin, A. (2016). Karakteristik yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek kepribadian, namun juga meliputi nilai-nilai ideologis, gaya komunikasi, pendekatan terhadap kekuasaan, serta respons terhadap dinamika sosial-politik. Kepemimpinan politik yang efektif harus mampu mengakomodasi kepentingan publik, membangun kepercayaan, serta menunjukkan ketegasan dan kepekaan dalam mengambil keputusan. Di era modern yang dipenuhi kompleksitas global dan tekanan publik yang tinggi, pemimpin politik dituntut untuk tidak hanya berwawasan luas dan cakap secara administratif, tetapi juga adaptif, transparan, dan etis. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana bentuk komunikasi politik pemimpin politik berkarakteristik menjadi aspek krusial, bagaimana dampak pemimpin berkarakteristik bagi masyarakat.

II. PENELITIAN YANG TERKAIT

1. Bentuk Komunikasi Politik Pemimpin Politik Berkarakteristik

Pemimpin politik berkarakteristik cenderung menggunakan komunikasi politik berbasis nilai moral dan etika publik, seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas (Bass & Bass, 2008; Yukl, 2013). Pemimpin politik yang berkarakteristik tidak hanya menonjol karena kapasitas kepemimpinannya, tetapi juga karena komitmen kuat terhadap nilai moral dan etika publik dalam setiap proses komunikasi politik yang dilakukan. Komunikasi yang dibangun tidak semata-mata berorientasi pada pencitraan atau keuntungan elektoral, melainkan pada penyampaian pesan politik yang mencerminkan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

Kejujuran menjadi aspek penting dalam pola komunikasi politik pemimpin berkarakteristik. Pesan yang disampaikan bersifat faktual, terbuka, dan menghindari manipulasi informasi yang berpotensi menyesatkan publik. Bentuk komunikasi yang jujur ini memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kondisi aktual kebijakan maupun capaian pemerintahan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan membangun basis dukungan yang rasional.

Selain itu, transparansi menjadi elemen penting dalam komunikasi politik pemimpin berkarakteristik. Keterbukaan informasi, baik terkait proses pengambilan keputusan, dasar pertimbangan kebijakan, maupun dampak yang ditimbulkan,

ditonjolkan untuk menciptakan akuntabilitas publik. Transparansi ini diwujudkan melalui forum-forum komunikasi publik, konferensi pers, publikasi dokumen resmi, dan pemanfaatan media digital yang memberikan akses informasi secara luas dan cepat kepada masyarakat.

Akuntabilitas juga menjadi landasan utama komunikasi politik pemimpin yang berkarakter. Penyampaian pesan tidak hanya sebatas janji politik, melainkan disertai penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan serta pertanggungjawaban atas capaian yang diraih. Hal ini mencerminkan orientasi komunikasi politik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang memberi ruang bagi publik untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan.

Seluruh proses komunikasi politik yang dilaksanakan dengan pendekatan moral dan etis ini dilakukan secara humanis dan partisipatif. Pemimpin politik berkarakter cenderung mengedepankan empati, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari penggunaan retorika yang bersifat memecah belah. Pola komunikasi yang demikian berkontribusi pada terbangunnya kedekatan emosional antara pemimpin dan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi politik yang berbasis pada kepercayaan jangka panjang.

Gaya komunikasi langsung lebih dominan dilakukan dengan masyarakat melalui dialog publik, pertemuan tatap muka, dan kunjungan lapangan (Arifin, 2016). Penggunaan media digital dan media sosial untuk menyampaikan kebijakan, klarifikasi isu, dan membangun kedekatan dengan publik (Arden, 2020). Komunikasi persuasif dan empatik yang menekankan pada pendekatan humanis dalam penyampaian pesan politik (Boin et al., 2017). Komunikasi politik dilakukan secara konsisten dan berulang untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman (McNair, 2011).

2. Komunikasi Politik sebagai Aspek Krusial dalam Kepemimpinan Berkarakteristik

Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemimpin berkarakteristik, yang dituntut untuk selalu transparan dan terbuka dalam pengambilan kebijakan (Yukl, 2013). Selain itu, perbedaan kepentingan politik dan tekanan kelompok tertentu menyebabkan komunikasi politik harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik (Arifin, 2016). (Castells, 2015) mengatakan dengan adanya perkembangan media sosial telah meningkatkan sensitivitas isu publik, sehingga komunikasi yang kurang tepat berpotensi menurunkan kepercayaan publik secara cepat. Maka (Boin et al., 2017) mengatakan bahwa pemimpin berkarakteristik sering menghadapi situasi krisis, di mana komunikasi politik memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik.

3. Dampak Kepemimpinan Politik Berkarakteristik bagi Masyarakat

Kepemimpinan politik berkarakteristik berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan publik (Bass & Bass, 2008; McNair, 2011). Kepemimpinan politik yang berkarakteristik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan publik. Kepemimpinan yang mengedepankan nilai moral, integritas, dan konsistensi etika politik cenderung membangun citra positif di mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bass dan Bass (2008) yang menyatakan bahwa karakter kepemimpinan, seperti kejujuran dan tanggung jawab, menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi suatu pemerintahan.

Pemimpin yang menerapkan prinsip kejujuran dalam komunikasi politiknya cenderung memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Masyarakat menunjukkan partisipasi politik yang lebih tinggi melalui pemilihan umum, dukungan terhadap program pemerintah, dan keterlibatan dalam forum publik (Norris, 2012). Penyampaian kebijakan secara terbuka, jelas, dan didukung data yang valid memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kepemimpinan tersebut berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan serta kesiapan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan memperkuat persepsi bahwa pemerintah memiliki integritas yang dapat diandalkan.

Komunikasi politik yang jelas dan empatik meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan publik serta mendorong budaya politik yang lebih sehat (Castells, 2015). Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah juga tumbuh seiring dengan adanya konsistensi antara ucapan dan tindakan pemimpin berkarakteristik. Ketika kebijakan publik yang disampaikan melalui komunikasi politik terbukti diimplementasikan sesuai dengan janji yang diberikan, hal ini meningkatkan legitimasi politik dan memperkuat relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Norris (2012), tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah erat kaitannya dengan pengalaman masyarakat dalam merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan serta transparansi proses yang mendasarinya.

Lebih jauh, kepemimpinan yang konsisten pada nilai moral mendorong stabilitas sosial karena menurunkan konflik horizontal dan meningkatkan rasa aman di kalangan warga (Arifin, 2016). Mengedepankan komunikasi empatik dan partisipatif mendorong masyarakat untuk lebih menerima kebijakan pemerintah, bahkan ketika kebijakan tersebut bersifat sulit atau tidak populer. Kepercayaan yang terbentuk melalui gaya kepemimpinan ini berdampak pada meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah dan memperkuat stabilitas sosial-politik. Dengan demikian, kepemimpinan politik berkarakteristik tidak hanya membangun legitimasi personal, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap institusi pemerintahan dan kebijakan publik secara keseluruhan.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber literatur terkait komunikasi politik, kepemimpinan berkarakter, dan dampaknya bagi masyarakat, tanpa terjun langsung ke lapangan.

Subjek Penelitian berupa sumber literatur yang relevan, meliputi: Buku-buku ilmiah tentang kepemimpinan politik dan komunikasi politik. Jurnal ilmiah nasional maupun internasional yang membahas komunikasi politik, kepemimpinan berkarakter, dan pengaruhnya pada masyarakat. Artikel ilmiah, laporan penelitian, disertasi, dan tesis yang relevan. Dokumen resmi (pidato politik, peraturan, laporan kebijakan) serta publikasi digital (media online, unggahan resmi pemimpin politik).

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian seperti laptop untuk mengakses jurnal elektronik dan sumber digital. Database ilmiah, Google Scholar, Sinta, DOAJ, Scopus, dan portal jurnal perguruan tinggi. Aplikasi manajemen referensi Mendeley atau Zotero untuk memudahkan pengelolaan daftar pustaka. Panduan telaah literatur: lembar kerja untuk mencatat ringkasan, relevansi, dan kata kunci dari setiap sumber literatur.

Adapun teknik pengumpulan data Adalah melakukan identifikasi kata kunci, penelusuran literatur, seleksi literatur, klasifikasi atau mengelompokkan data (bentuk komunikasi politik pemimpin berkarakteristik, alasan komunikasi politik menjadi krusial dan dampak kepemimpinan berkarakter terhadap masyarakat) dan Pencatatan data.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) seperti reduksi data, koding tematik atau memberi kode pada tema-tema (gaya komunikasi, nilai karakter, dampak pada kepercayaan publik). Sintesis data: menyusun kesimpulan teoretis berdasarkan hasil temuan literatur dan verifikasi membandingkan antar sumber untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Komunikasi Politik Pemimpin Politik Berkarakteristik

Pemimpin politik berkarakteristik cenderung menggunakan komunikasi politik berbasis nilai moral dan etika publik, seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas (Bass & Bass, 2008; Yukl, 2013). Pemimpin politik yang berkarakteristik tidak hanya menonjol karena kapasitas kepemimpinannya, tetapi juga karena komitmen kuat terhadap nilai moral dan etika publik dalam setiap proses komunikasi politik yang dilakukan. Komunikasi yang dibangun tidak semata-mata berorientasi pada pencitraan atau keuntungan elektoral, melainkan pada penyampaian pesan politik yang mencerminkan prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.

Kejujuran menjadi aspek penting dalam pola komunikasi politik pemimpin berkarakteristik. Pesan yang disampaikan bersifat faktual, terbuka, dan menghindari manipulasi informasi yang berpotensi menyesatkan publik. Bentuk komunikasi yang jujur ini memungkinkan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kondisi aktual kebijakan maupun capaian pemerintahan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan membangun basis dukungan yang rasional.

Selain itu, transparansi menjadi elemen penting dalam komunikasi politik pemimpin berkarakteristik. Keterbukaan informasi, baik terkait proses pengambilan keputusan, dasar pertimbangan kebijakan, maupun dampak yang ditimbulkan, ditonjolkan untuk menciptakan akuntabilitas publik. Transparansi ini diwujudkan melalui forum-forum komunikasi publik, konferensi pers, publikasi dokumen resmi, dan pemanfaatan media digital yang memberikan akses informasi secara luas dan cepat kepada masyarakat.

Akuntabilitas juga menjadi landasan utama komunikasi politik pemimpin yang berkarakter. Penyampaian pesan tidak hanya sebatas janji politik, melainkan disertai penjelasan mengenai pelaksanaan kebijakan serta pertanggungjawaban atas capaian yang diraih. Hal ini mencerminkan orientasi komunikasi politik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang memberi ruang bagi publik untuk mengevaluasi kinerja kepemimpinan.

Seluruh proses komunikasi politik yang dilaksanakan dengan pendekatan moral dan etis ini dilakukan secara humanis dan partisipatif. Pemimpin politik berkarakter cenderung mengedepankan empati, menghargai perbedaan pendapat, dan menghindari penggunaan retorika yang bersifat memecah belah. Pola komunikasi yang demikian berkontribusi pada terbangunnya kedekatan emosional antara pemimpin dan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi politik yang berbasis pada kepercayaan jangka panjang.

Gaya komunikasi langsung lebih dominan dilakukan dengan masyarakat melalui dialog publik, pertemuan tatap muka, dan kunjungan lapangan (Arifin, 2016). Penggunaan media digital dan media sosial untuk menyampaikan kebijakan, klarifikasi isu, dan membangun kedekatan dengan publik (Arden, 2020). Komunikasi persuasif dan empatik yang menekankan pada pendekatan humanis dalam penyampaian pesan politik (Boin et al., 2017). Komunikasi politik dilakukan secara konsisten dan berulang untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari kesalahpahaman (McNair, 2011).

2. Komunikasi Politik sebagai Aspek Krusial dalam Kepemimpinan Berkarakteristik

Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pemimpin berkarakteristik, yang dituntut untuk selalu transparan dan terbuka dalam pengambilan kebijakan (Yukl, 2013). Selain itu, perbedaan kepentingan politik dan tekanan kelompok tertentu menyebabkan komunikasi politik harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan konflik (Arifin, 2016). (Castells, 2015) mengatakan dengan adanya perkembangan media sosial telah meningkatkan sensitivitas isu publik, sehingga komunikasi yang kurang tepat berpotensi menurunkan kepercayaan publik secara cepat. Maka (Boin et al., 2017) mengatakan bahwa pemimpin berkarakteristik sering menghadapi situasi krisis, di mana komunikasi politik memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas politik.

3. Dampak Kepemimpinan Politik Berkarakteristik bagi Masyarakat

Kepemimpinan politik berkarakteristik berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan publik (Bass & Bass, 2008; McNair, 2011). Kepemimpinan politik yang berkarakteristik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan publik. Kepemimpinan yang mengedepankan nilai moral, integritas, dan konsistensi etika politik cenderung membangun citra positif di

mata masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan Bass dan Bass (2008) yang menyatakan bahwa karakter kepemimpinan, seperti kejujuran dan tanggung jawab, menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi suatu pemerintahan.

Pemimpin yang menerapkan prinsip kejujuran dalam komunikasi politiknya cenderung memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi. Masyarakat menunjukkan partisipasi politik yang lebih tinggi melalui pemilihan umum, dukungan terhadap program pemerintah, dan keterlibatan dalam forum publik (Norris, 2012). Penyampaian kebijakan secara terbuka, jelas, dan didukung data yang valid memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa kepemimpinan tersebut berorientasi pada kepentingan publik. Selain itu, transparansi dalam pengambilan keputusan serta kesiapan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan memperkuat persepsi bahwa pemerintah memiliki integritas yang dapat diandalkan.

Komunikasi politik yang jelas dan empatik meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap kebijakan publik serta mendorong budaya politik yang lebih sehat (Castells, 2015). Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah juga tumbuh seiring dengan adanya konsistensi antara ucapan dan tindakan pemimpin berkarakteristik. Ketika kebijakan publik yang disampaikan melalui komunikasi politik terbukti diimplementasikan sesuai dengan janji yang diberikan, hal ini meningkatkan legitimasi politik dan memperkuat relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Menurut Norris (2012), tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah erat kaitannya dengan pengalaman masyarakat dalam merasakan manfaat nyata dari kebijakan yang diterapkan serta transparansi proses yang mendasarinya.

Lebih jauh, kepemimpinan yang konsisten pada nilai moral mendorong stabilitas sosial karena menurunkan konflik horizontal dan meningkatkan rasa aman di kalangan warga (Arifin, 2016). Mengedepankan komunikasi empatik dan partisipatif mendorong masyarakat untuk lebih menerima kebijakan pemerintah, bahkan ketika kebijakan tersebut bersifat sulit atau tidak populer. Kepercayaan yang terbentuk melalui gaya kepemimpinan ini berdampak pada meningkatnya partisipasi publik dalam mendukung program pemerintah dan memperkuat stabilitas sosial-politik. Dengan demikian, kepemimpinan politik berkarakteristik tidak hanya membangun legitimasi personal, tetapi juga menciptakan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap institusi pemerintahan dan kebijakan publik secara keseluruhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan politik yang berkarakteristik, yang mengedepankan kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan etika publik, memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan publik. Temuan ini mendukung teori Bass dan Bass (2008), yang menyatakan bahwa karakter kepemimpinan yang kuat dan beretika merupakan salah satu faktor penentu efektivitas kepemimpinan dan legitimasi politik.

Studi Norris (2012) juga relevan, di mana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sangat ditentukan oleh persepsi publik terhadap integritas dan kualitas komunikasi politik yang dilakukan pemimpin. Dalam konteks komunikasi politik, temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian McNair (2011) yang menegaskan bahwa komunikasi politik yang berbasis etika publik mampu meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan memperkuat legitimasi pemerintahan.

Selain itu, penelitian Arifin (2016) menyebutkan bahwa komunikasi politik yang mengedepankan kejujuran dan keterbukaan informasi berperan penting dalam menciptakan stabilitas politik serta meningkatkan keterlibatan publik. Penelitian ini juga selaras dengan temuan Castells (2015), yang mengungkapkan bahwa dalam era digital, komunikasi politik yang berbasis nilai moral memiliki keunggulan dalam membangun kedekatan dengan publik sekaligus mengurangi risiko misinformasi.

1. Interpretasi Temuan

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan publik tidak hanya dibentuk melalui kualitas kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga oleh cara kebijakan tersebut dikomunikasikan. Pemimpin politik yang memiliki karakter kuat dan mengedepankan nilai moral memiliki kemampuan untuk menciptakan relasi yang lebih mendalam dengan masyarakat, karena komunikasi yang dilakukan bukan hanya informatif tetapi juga edukatif dan partisipatif.

Kepemimpinan yang berkarakteristik cenderung menghadirkan komunikasi politik yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini membentuk persepsi positif publik terhadap integritas institusi pemerintah. Dalam perspektif sosiopolitik, temuan ini memperkuat konsep legitimasi berbasis kepercayaan publik yang dikemukakan oleh Norris (2012), di mana penerimaan masyarakat terhadap kebijakan publik meningkat seiring dengan adanya konsistensi antara komunikasi, tindakan, dan hasil kebijakan yang nyata.

Selain itu, komunikasi politik yang berlandaskan etika publik juga memperkuat budaya demokrasi deliberatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan (McNair, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan politik berkarakteristik memiliki implikasi yang lebih luas terhadap stabilitas sosial dan pembangunan politik yang berkelanjutan.

2. Kelemahan Penelitian

Meskipun temuan ini memberikan kontribusi akademis dan praktis, penelitian memiliki beberapa keterbatasan:

- a. Keterbatasan Data Empiris Lapangan: Penelitian ini berbasis studi pustaka sehingga tidak menyajikan data empiris langsung dari responden atau studi kasus tertentu. Hal ini dapat membatasi kedalaman analisis kontekstual.
- b. Ruang Lingkup Literatur: Beberapa literatur yang digunakan bersifat klasik, sementara dinamika politik saat ini dipengaruhi oleh faktor digitalisasi yang berkembang pesat, yang mungkin membutuhkan sumber yang lebih terkini.
- c. Tidak Mengukur Data Kuantitatif: Penelitian ini belum melakukan pengukuran kuantitatif yang dapat memberikan validasi numerik terkait besarnya pengaruh kepemimpinan berkarakter terhadap tingkat kepercayaan publik.

3. Implikasi Penelitian

- a. Implikasi Teoretis: Temuan ini memperkaya literatur tentang komunikasi politik berbasis etika publik serta menegaskan pentingnya karakter pemimpin sebagai variabel kunci dalam legitimasi politik.
- b. Implikasi Praktis: Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemimpin politik dan praktisi komunikasi politik dalam menyusun strategi komunikasi yang menekankan kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, terutama dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital.
- c. Implikasi Sosial: Masyarakat mendapatkan dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi kualitas kepemimpinan politik berdasarkan nilai moral dan integritas, bukan semata-mata pada retorika kampanye atau pencitraan.

V. KESIMPULAN

1. Bentuk Komunikasi Politik Pemimpin Berkarakteristik

Pemimpin politik yang memiliki karakter kuat cenderung menggunakan komunikasi politik berbasis nilai moral dan etika publik, seperti kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas. Komunikasi tersebut dilakukan melalui pendekatan yang jujur, terbuka, dan empatik, serta memanfaatkan media konvensional maupun digital sebagai sarana penyampaian pesan politik secara luas dan inklusif.

2. Komunikasi Politik sebagai Aspek Krusial

Komunikasi politik menjadi aspek krusial dalam kepemimpinan politik berkarakteristik karena adanya ekspektasi publik yang tinggi terhadap integritas dan keterbukaan pemimpin. Dalam konteks politik modern, komunikasi yang salah atau tidak transparan dapat berdampak langsung pada turunnya kepercayaan publik, sementara komunikasi yang jelas dan akuntabel memperkuat legitimasi politik.

3. Dampak Kepemimpinan Berkarakteristik bagi Masyarakat

Kepemimpinan politik yang mengedepankan nilai moral dan etika publik berdampak positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan kebijakan publik. Hal ini tercermin dari meningkatnya partisipasi politik masyarakat, penerimaan terhadap kebijakan publik, serta stabilitas sosial-politik yang lebih baik.

4. Keterbatasan dan Implikasi

Penelitian ini berbasis pada studi pustaka sehingga tidak menyajikan data empiris langsung dari lapangan. Meskipun demikian, temuan penelitian ini memperkuat literatur yang ada dan memberikan implikasi penting bagi pengembangan strategi komunikasi politik yang beretika serta pendidikan politik masyarakat agar mampu menilai kepemimpinan secara lebih objektif.

Saran:

Penelitian ini berbasis studi pustaka sehingga peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara, survei, atau studi kasus guna memperoleh data empiris yang lebih mendalam mengenai hubungan karakter kepemimpinan dan tingkat kepercayaan publik. Bagi praktisi politik, diperlukan penerapan strategi komunikasi berbasis nilai moral, transparansi, dan akuntabilitas secara konsisten, khususnya di era digital yang sensitif terhadap isu publik. Hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh akademisi dan pendidikan politik untuk memperkuat literasi politik masyarakat agar mampu menilai kepemimpinan secara objektif berdasarkan integritas, bukan semata retorika atau pencitraan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada pihak yang membantu ataupun memberikan dukungan terkait dengan penelitian yang dilakukan seperti bantuan fasilitas penelitian, dana hibah, dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardern, J. (2023). Pidato tentang Kepemimpinan dan Komunikasi dalam Krisis. Government of New Zealand.
- [2] Arifin, A. (2023). Komunikasi Politik: Paradigma, Teori, Aplikasi, dan Komunikasi Pemerintahan. Graha Ilmu.
- [3] Bass, B. M., & Bass, R. (2008). The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research, and Managerial Applications (4th ed.). Free Press.
- [4] Burns, J. M. (2024). Kepemimpinan Harper & Row.
- [5] Castells, M. (2025). Jaringan Kemarahan dan Harapan: Gerakan Sosial di Era Internet (2nd ed.). Polity Press.
- [6] Heywood, A. (2023). Politics (3rd ed.). Palgrave Macmillan.
- [7] Lipset, S. M. (2024). Political man: The social bases of politics. Johns Hopkins University Press.
- [8] McNair, B. (2023). Pengantar Komunikasi Politik (5th ed.). Routledge.
- [9] Mujani, S., & Liddle, R. W. (2013). Voting behavior in Indonesia since democratization: Critical democrats. Cambridge University Press.
- [10] Norris, P. (2022). Defisit Demokrasi: Warga Negara yang Kritis Ditinjau Kembali. Cambridge University Press.
- [11] Yukl, G. (2023). Leadership in Organizations (8th ed.). Pearson.
- [12] Rasyid, M. R. (2023). Makna demokrasi dan kepemimpinan dalam pembangunan. UII Press.